

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu sistem yang merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010), serta memperhatikan kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam (Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019). pilar utama dalam pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi itu sendiri.

Akuntansi pemerintah Merupakan disiplin ilmu akuntansi yang sedang mengalami perkembangan pesat. Dalam sistem akuntansi pemerintahan, ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem akuntansi di daerah. Tujuan utama dari perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, yang berfokus pada hasil, profesional serta dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel (Maharani, 2025).

Maraknya permasalahan tentang kualitas laporan keuangan saat ini ramai dibicarakan. Banyak kasus di Indonesia mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kurang baik. Tuntutan akuntabilitas sangat penting guna menyediakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan membantu pemerintah meningkatkan kinerja perangkat daerah. Laporan keuangan dihasilkan melalui kesepakatan yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yang

merupakan media bagi perusahaan untuk memberikan deskripsi kegiatannya kepada khalayak umum dan berguna untuk menginformasikan keputusan kepada pengguna. Dalam memberikan informasi harus bermanfaat bagi penggunanya dengan nilai yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas tinggi. Aspek utama untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dibutuhkan laporan yang disusun dengan berpegang prinsip ketepatan waktu dan SAP (Mumtaza, 2023).

Kebutuhan akan informasi mendorong pemerintah untuk menyediakan perangkat teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengolahan data menjadi sebuah informasi. Dalam konteks pemerintahan, informasi merupakan hasil dari proses pengolahan data keuangan, administrasi, maupun operasional yang kemudian disajikan secara sistematis agar dapat mendukung perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja pemerintah. Perkembangan sistem informasi berbasis teknologi (komputer) telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap organisasi (entitas) guna memenuhi berbagai tuntutan efektif, efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan (Jannah, 2024).

Kualitas laporan keuangan ini dapat di lihat bagaimana kinerja lembaga tersebut. Kinerja pemerintahan yang baik bisa dinilai dari input, *output*, serta *outcome*, secara bersama- bersama, di mana alokasi bayaran serta pelayanan yang menekankan pada 3 elemen utama, ekonomi, efisiensi, serta daya guna. Guna untuk meningkat kinerja pemerintah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengendalian internal,

pengontrolan praktis dan penerapan sistem informasi dalam akuntansi (Apriliya, 2024).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bergantung pada seberapa baik pengendalian internalnya. Jika tidak baik, akan sulit untuk menemukan kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga bukti audit yang diperoleh pemerintah daerah dari informasi dan data akuntansi tidak dapat diandalkan. Kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang belum optimal tercermin dari capaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 yang belum optimal (belum WTP), di mana pada tahun 2009-2010 memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) dan pada tahun 2011-2014 memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa bertanggung jawab BPK terletak pada pernyataan atau opini atas laporan keuangan, sedangkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab entitas.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara sendiri terus mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2019 sendiri tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara mencapai Rp 279 miliar rupiah dan turun menjadi Rp 178 miliar rupiah pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih belum maksimal dalam bekerja mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator alat ukur tingkat kemandirian keuangan daerah selain dari Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ramadhani *et al.*, 2024).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menginformasikan kepada individu atau masyarakat untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya transparansi, proses pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih mudah diawasi oleh masyarakat, lembaga pengawas, serta aparat pemeriksa, sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi, penyalahgunaan anggaran, dan praktik tidak etis lainnya. Pengelolaan pelaporan keuangan harus transparan, jujur, terbuka dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan akuntabilitas serta memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa maupun daerah. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya berkaitan dengan keterbukaan angka-angka keuangan semata, tetapi juga menyangkut keterbukaan proses, mekanisme, serta pertanggung jawaban pemerintah dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran (Fitri & Arza, 2023).

Anggaran pemerintah daerah adalah rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran dalam unit moneter, serta merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi finansial suatu organisasi atau kelompok. Gambaran tersebut meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, serta estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis para *stakeholder* pemerintah daerah. Anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efektivitas pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, pengawasan internal, serta kemampuan pemerintah dalam mengontrol

pelaksanaan program (Apriliya, 2024). Tanpa adanya SDM yang kompeten dan didukung oleh sistem serta pengendalian internal yang kuat, penggunaan anggaran akan rentan terhadap penyimpangan dan ketidakefisienan. Dengan demikian, anggaran yang disusun secara transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena setiap prosesnya terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan (Wibowo & Susliyanti, 2024).

Menurut Romney & Steinbart (2015) pengendalian internal adalah sebuah proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen, yang mana pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai untuk mencapai tujuan pengendalian seperti mengamankan aset, mengelola catatan dengan detail, memberikan informasi akurat, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang ditentukan serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal seharusnya memberi kepastian yang cukup bagi dewan komisaris dan manajemen. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi (Fernando, 2024).

Menurut Mangkunegara (2016) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan, dan kemampuan serta karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam menyelesaikan tugasnya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis (Rahayu *et al.*, 2020).

Sumber daya manusia sangat penting untuk memenuhi tugas dan fungsi organisasi. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen dalam suatu organisasi. Nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh fakta bahwa keterampilan atau kemampuan (kompetensi) seseorang berkembang selama bekerja, terlepas dari latar belakang, dalam batas kemungkinan pengembangan keterampilannya (Fitri & Arza, 2023).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas mencerminkan keberhasilan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan menjadi ukuran penting karena dapat memengaruhi kepercayaan publik, pengambilan keputusan, serta pemantauan kinerja pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, banyak laporan keuangan daerah belum mampu menunjukkan kualitas yang optimal, yang ditandai oleh opini audit yang belum sesuai harapan atau ketidaksesuaian standar pelaporan yang berlaku.

Salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah transparansi anggaran. Transparansi anggaran mencakup keterbukaan informasi anggaran mulai dari perencanaan hingga realisasi dan pertanggungjawaban, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau dan mengawasi proses pengelolaan keuangan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola keuangan yang baik dan memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan karena memberikan informasi yang lebih jelas dan akuntabel terhadap pengeluaran dan pendapatan daerah. Penelitian sebelumnya bahkan menggabungkan transparansi bersama akuntabilitas dan sistem pengendalian dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, di mana transparansi terbukti memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Khikmah, 2024).

Salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah transparansi anggaran. Menurut hasil penelitian empiris yang dilakukan di tingkat organisasi perangkat daerah, transparansi termasuk penyajian informasi anggaran yang terbuka dan mudah diakses berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Studi oleh Khikmah (2024) menyatakan bahwa variabel transparansi bersama dengan akuntabilitas, pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin transparan penyajian dan pengelolaan anggaran, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Sari *et al.*, 2024)

Selain transparansi, pengendalian internal merupakan variabel penting yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan setiap transaksi dan proses pencatatan telah berjalan sesuai prosedur yang benar. Sistem pengendalian internal yang kuat membantu meminimalkan kesalahan, kecurangan, dan risiko penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan. Di samping itu, kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi SDM mencerminkan kemampuan aparat pengelola keuangan daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip akuntansi pemerintah serta regulasi terkait pelaporan keuangan. Studi literatur menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki efek positif terhadap kualitas laporan keuangan, terutama ketika kemampuan teknis, pengalaman, dan pengetahuan profesional pegawai semakin meningkat, sehingga kesalahan dan inkonsistensi dalam laporan dapat diminimalkan (Johari *et al.*, 2024).

Ketiga variabel ini transparansi anggaran, pengendalian internal, serta kompetensi SDM tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Transparansi anggaran menciptakan dasar keterbukaan informasi, pengendalian internal memberikan kerangka kontrol dan akuntabilitas, sementara kompetensi SDM memastikan pelaksanaan tata kelola anggaran dan pelaporan berjalan dengan baik sesuai standar. Berdasarkan bukti empiris dari berbagai penelitian sebelumnya, penguatan ketiga faktor tersebut diharapkan dapat secara simultan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, sehingga laporan

keuangan bukan hanya memenuhi aspek formal tetapi juga mampu mencerminkan realitas keuangan daerah secara andal (Akram *et al.*, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, masih terdapat sejumlah kesenjangan empiris yang menunjukkan belum konsistennya temuan di lapangan. Penelitian terdahulu seperti Fitri & Arza (2023) menegaskan bahwa transparansi anggaran berperan penting dalam mencegah kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas, namun beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan karena implementasinya belum merata, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan SDM. Selain itu, meskipun teori yang dikemukakan Romney & Steinbart (2015) serta temuan Fernando (2024) menjelaskan bahwa pengendalian internal memiliki peran besar dalam menjamin keandalan laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK justru menunjukkan masih adanya kelemahan signifikan dalam pengendalian internal di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara yang masih memperoleh opini WDP dan TMP.

Ketidakkonsistenan juga terlihat pada variabel kompetensi SDM, di mana penelitian Rahayu *et al.* (2020) menegaskan pengaruh kuat kompetensi terhadap kualitas pelaporan, namun kenyataannya Aceh Utara masih menghadapi lemahnya penyusunan laporan dan penurunan PAD, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi teoritis dan kemampuan riil SDM daerah. Lebih jauh, penelitian terdahulu umumnya hanya meneliti satu atau dua variabel seperti transparansi, pengendalian internal, atau kompetensi SDM secara terpisah, sehingga belum banyak penelitian yang menguji pengaruh keempat faktor tersebut secara simultan, padahal

permasalahan kualitas laporan keuangan di Aceh Utara menunjukkan bahwa berbagai faktor saling berinteraksi dan tidak berdiri sendiri. Selain itu, minimnya penelitian yang menggunakan data terbaru pasca pemberlakuan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta penerapan penuh SAP berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010) juga menimbulkan gap empiris, karena belum banyak bukti empiris yang mencerminkan pengaruh regulasi terbaru terhadap kualitas laporan keuangan, terutama di daerah yang opini BPK-nya masih belum stabil seperti Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran, efektivitas pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta kualitas sistem pengelolaan keuangan merupakan faktor yang saling berkaitan dan bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat transparansi yang ditunjukkan pemerintah dalam mengelola anggaran, semakin besar peluang masyarakat dan lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya pemerintahan, sehingga kualitas pelaporan keuangan akan meningkat. Demikian pula, semakin baik pengendalian internal diterapkan, semakin andal dan akurat laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan yang baik pada akhirnya akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Tabel 1.1
Tabel Opini BPK Terhadap Hasil Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Utara
2020-2024

No.	Tahun Anggaran	Perolehan Opini
1	2020	Wajar Tanpa Pengendalian (WTP)
2	2021	Wajar Tanpa Pengendalian (WTP)
3	2022	Wajar Tanpa Pengendalian (WTP)
4	2023	Wajar Tanpa Pengendalian (WTP)
5	2024	Wajar Tanpa Pengendalian (WTP)

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, LHP LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023 diolah Kembali, 2025.

Meskipun Kabupaten Aceh Utara berhasil meraih opini WTP yang kesembilan pada Laporan Keuangan Tahun 2023, berita ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda bahwa sistem pengendalian internal di pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini terlihat dari opini WTP yang diberikan melalui Penekanan Suatu Hal (PSH), yang artinya BPK masih menemukan masalah khusus terkait pengawasan proses pelaporan keuangan. Temuan seperti kekacauan dalam pengelolaan aset, rekonsiliasi yang tidak seragam antar-OPD, atau masih kurangnya dokumen pertanggungjawaban, itu semua menggambarkan bahwa beberapa bagian pengendalian internal belum maksimal. Walaupun temuan ini tidak terlalu berpengaruh besar sehingga opini WTP tetap, catatan khusus dari BPK menunjukkan bahwa risiko kesalahan dan kelemahan prosedur masih perlu ditangani secara serius.

Penekanan yang disampaikan BPK, ditambah pernyataan Ketua DPRK tentang pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, semakin memperkuat bahwa masalah dalam pengendalian internal tetap menjadi fokus utama. Kehadiran pejabat teknis seperti Kabid Akuntansi, Kabid Aset, Inspektur Pembantu, dan tim BPKD saat menyerahkan LHP menandakan adanya evaluasi mendalam terhadap bagian-bagian pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki. Lagi pula,

ucapan Pj. Bupati yang menekankan penerapan tata kelola yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah sadar masih ada lubang dalam mekanisme pengawasan internal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi, meskipun WTP berhasil diraih, adanya catatan perbaikan ini bukti bahwa meningkatkan efektivitas pengendalian internal masih menjadi kebutuhan krusial untuk menjaga kualitas laporan keuangan ke depannya (Jafaruddin, 2024).

Berdasarkan temuan dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan atau kontradiksi antara hasil penelitian saat ini dengan temuan dari studi-studi Sebelumnya. Oleh karena itu, Penelitian akan melakukan penelitian untuk menguji **”Pengaruh Transparansi Anggaran, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi anggaran terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas transparansi anggaran, pengendalian internal, dan kompetensi SDM dalam konteks tata kelola keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara: Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui perbaikan transparansi, pengendalian internal, dan kompetensi SDM.
- b. Bagi SKPK: Memberikan gambaran aspek yang perlu diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih akuntabel dan transparan.

- c. Bagi BPK dan Inspektorat Daerah: Memberikan informasi tambahan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- d. Bagi Mahasiswa dan Akademisi: Menjadi referensi ilmiah dalam kajian akuntansi pemerintahan dan manajemen keuangan daerah